



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR: 813.05 / Kep. 92-BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
FORMASI TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Formasi Jabatan Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis melalui Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan upaya untuk memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara formasi tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta formasi Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum

Plt. Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 404);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt. Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2024 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor
12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor
12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta Formasi Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
sebagai berikut :
1. Pengarah:
mempunyai tugas memberikan petunjuk,
bimbingan dan arahan demi kelancaran
pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Daerah
Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta Formasi
Tahun 2026.
 2. Ketua:
mempunyai tugas sebagai pimpinan dan
bertanggungjawab atas kelancaran seluruh
kegiatan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2026
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya ke
Bupati Purwakarta.
 3. Wakil Ketua:
mempunyai tugas dan bertanggung jawab
membantu ketua atas kelancaran seluruh
kegiatan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta Formasi Tahun 2026.
 4. Sekretaris:
mempunyai tugas dan bertanggung jawab
membantu ketua dalam bidang administrasi
mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan
sampai dengan pelaporan.

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum
		

Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
		

5. Tim Pengawas Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara:

Tim Pengawasan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara adalah unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta. Tim Pengawasan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

6. Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Jabatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara:

Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Jabatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara adalah kepanitiaan yang ditunjuk untuk melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan jabatan pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas unsur perencanaan, keuangan, kepegawaian dan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Jabatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan kebutuhan jabatan yang akan diusulkan pada pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.

7. Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara:

Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara adalah kepanitiaan yang ditunjuk untuk melaksanakan teknis pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta unsur perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi data pelamar untuk memastikan data peserta seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) yang digunakan oleh panitia seleksi daerah.

8. Tim Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara:

Tim Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara adalah kepanitiaan yang ditunjuk untuk melaksanakan teknis pengadaan Aparatur Sipil Negara terdiri atas unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta unsur perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tim Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas

Sekretaris Daerah	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum	Kepala Bagian Hukum		Plt.Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kepala Bidang Pengadaan
						

memastikan seluruh tahapan seleksi kompetensi berjalan dengan baik, memastikan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi kompetensi telah tersedia serta menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas data layanan kependudukan bagi peserta seleksi kompetensi.

9. Tim Helpdesk:

Tim Helpdesk adalah kepanitiaan yang ditunjuk untuk memberikan informasi kepada para pelamar apabila terjadi permasalahan/kendala dalam melakukan proses lamaran sampai dengan proses pengadaan CASN berakhir dan menyebarkan informasi terkait seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan CASN. Tim Helpdesk ini adalah unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

10. Tim Admin:

Tim admin adalah kepanitiaan yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang dalam hal ini adalah unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Januari 2026.

Paraf Pemrakarsa		
Dewi Proklamasi, SE.,M.M	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt.KEPALA BKPSDM	

Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
PURWAKARTA
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA FORMASI
TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
FORMASI TAHUN 2026

- I. Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- IV. Sekretaris : Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- V. Tim Pengawas Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara : Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
- VI. Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Jabatan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta unsur perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- VII. Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta unsur perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- VIII. Tim Seleksi Kompetensi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta unsur perangkat daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- IX. Tim Help Desk : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta
- X. Tim Admin : Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta

Paraf Pemrakarsa		
Dewi Proklamasi, SE.,M.M	KEPALA BIDANG PENGADAAN	
Cika Siskawati, ST., M.Tr.A.P	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	Plt.KEPALA BKPSDM	

Paraf Koordinasi		
Suntama, SH., M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
Mochamad Arif Budiman, SP., MM	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. Sri Jaya Midan, M.P	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN